KAPANEWON SEWON

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Visitificaci Dolakcana		
	Uji Konsekuensi Informasi Publik	Nama SOP
	MIP_196806101992032013	7
	Bembina Lingkat I, IV/b	177
	* HARTINI/STP/M.M.	
	P SEMON	
	KAPANERS	
	(R)	
	LAP PANEW DE SEWON	Disahkan Oleh
	20 Agustus 2024	Tgl. Pengesahan
		Tgl. Revisi
	13 Agustus 2024	Tgl. Pembuatan
	В/000.8.3.3/00801	Nomor SOP



KAPANEWON SEWON

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- ω'n Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
- 4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun Negeri dan Pemerintahan Daerah; 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 6 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar
- œ Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik; Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kualifikasi Pelaksana

- Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer Pendidikan minimal SLTA;
- dan Analis;
- Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

4

Peringatan - Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka - Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan kepada da Atasan PPID atau sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah.	KeterkaitanPei1. SOP Permohonan Informasi1.2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik2.3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik4.5.6.
Pencatatan dan Pendataan Daftar Informasi yang Dikecualikan disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan softcopy.	Peralatan/Perlengkapan 1. Daftar Informasi Publik 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Jaringan Internet

1

The second

- 1

pengecualiannya. 4 PPID Pelaksana mengajukan draft Informasi yang Dikecualikan yang diajukan ke PPID Kabupaten kepad PPID.		pengecual	habis jangka waktu	3 Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan jika te	2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen ya tidak termasuk dalam	1 Mengumpu dan dokum yang dikuas Pelaksana	Uraian Prosedur		
	Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan ke PPID Kabupaten kepada Atasan	PPID Pelaksana mengajukan draft Usulan	ka waktu iannya.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan jika telah	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana	sedur		
							PPID Pelaksana		
				1, 1,	In.		Atasan PPID	Pelaksana	
-							PPID Kabupaten		
Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	Dikecualikan	Draft Usulan Informasi yang	lalu	Daftar Informasi Publik Tahun	Informasi Publik yang dikecualikan	Usulan Informasi Publik	Persyaratan/ Kelengkapan		
g 1 hari kerja	2 hari kerja			1 hari kerja	5 hari kerja	1 hari kerja	Waktu	Mutu Baku	
Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari rja PPID Pelaksana	Dikecualikan	Usulan Daftar Informasi yang		Draft Usulan Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	Publik Draft Kajian	Output Daffar Informasi		
ari								Keterangan	

00	The T	6
PPID Pelaksana mempublikasikan DIK dalam website Pemerintah Kapanewon Sewon.	PPID Kabupaten menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo	PPID Kabupaten melakukan Uji Konsekuensi Bersama Tim Pertimbangan PPID Tingkat Kabupaten dan penandatangan Berita Acara Uji Konsekuensi.
	Art.	
		-
SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana
10 menit	2 hari kerja	1 hari kerja
Adanya Intormasi Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam website resmi Pemerintah Kapanewon Sewon.	SK Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi yang memuat Daftar Informasi yang Dikecualikan